

**FENOMENA PERILAKU TIDAK MEMILIH PADA PEMILIHAN WALIKOTA
MAKASSAR 2018 DI KELURAHAN MANGGALA**

Fahrunnisa Dwi Insani, Nurlela, St.Junaeda
Program Studi Pendidikan Antropologi FISH-UNM
Email: fahrunisadwiinsani94@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Pandangan masyarakat yang tidak memilih dalam pemilihan umum Walikota Makassar di Kelurahan Manggala. (2) Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi masyarakat lebih memilih tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum Walikota Makassar di Kelurahan Manggala. (3) Dampak dari perilaku masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum Walikota Makassar di Kelurahan Manggala. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif yang dianalisis dan dituliskan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi , wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan beberapa informan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) masyarakat memilih golput dikarenakan mereka tidak terlalu percaya terhadap calon yang maju sebagai kandidat serta mereka beranggapan bahwa suara mereka kelak tidak akan berpengaruh terhadap hasil pemilu atau dapat dikatakan kepercayaan politik yang dimiliki masyarakat mengalami penurunan, atas alasan itu mereka lebih mementingkan pekerjaan pribadi dari pada datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan hak suara. (2) faktor psikologi dimana kedekatan yang kurang mereka rasakan terhadap kandidat, faktor sistem politik sangat mempengaruhi persepsi masyarakat karena biasanya para calon walikota setelah pilkada biasa melupakan program-programnya kepada masyarakat, faktor kepercayaan politik adalah alasan atau penyebab ketidakpercayaan pemilih terhadap kandidat akan membawa perubahan dan perbaikan bagi kondisi masyarakat, faktor sosial ekonomi, masyarakat yang mayoritas tingkat pendidikan dan ekonomi rendah jadi masyarakat lebih mementingkan apa yang nampak dan menghasilkan sesuatu yang pasti dan menguntungkan daripada menggantungkan harapan yang tidak pasti. (3) sangat berpotensi menjadi kekuatan yang dapat melakukan sabotase surat suara yang tidak dipake dan berpotensi gagalnya pencapaian tujuan program yang ada cukup besar.

Kata Kunci: Perilaku tidak memilih, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tidak memilih, dampak perilaku tidak memilih

Pendahuluan

Di Indonesia sendiri, hampir sama dengan negara bangsa lainnya. Sebagai negara yang baru lahir pasca perang dunia ke-2, dari tahun 1955 sampai dengan 1999, demokrasi kerap disamakan dengan monarki di orde lama dan aristokrasi di orde baru. Pasca beberapa Negara di Asia di landa krisis moneter dan salah satu yang paling terkena dampak adalah Indonesia. Pemilihan pemimpin negara yang awalnya tertutup menjadi terbuka, rakyat biasa ikut serta secara langsung dalam memilih calon presiden.

Perilaku tidak memilih telah menjadi fenomena politik yang menarik di Makassar. Perilaku tidak memilih diartikan sebagai pemilih yang tidak mempergunakan hak pilihnya secara sadar tanpa ada paksaan dari pihak lain. Terdapat sejumlah analisis untuk menjelaskan pertanyaan mengapa terdapat fenomena perilaku tidak memilih di banyak daerah.

Menurut Kacung Marijan dalam bukunya Demokratisasi di Daerah terdapat setidaknya lima alasan kenapa masyarakat menjadi perilaku tidak memilih yakni: Pertama, bagi para pemilih datang ke TPS-TPS tidak lagi penting karena tidak ada isu yang signifikan. Kedua, analisis ini dikaitkan dengan globalisasi yang semakin mereduksi kekuatan negara sehingga perilaku tidak memilih telah menjadi fenomena global. Ketiga, penurunan tingkat partisipasi pemilih itu dikaitkan dengan turunnya tingkat kepuasan terhadap performance pemerintah. Keempat, perilaku tidak memilih juga dapat diakibatkan oleh tingkat kepercayaan yang terlalu tinggi kepada pemerintah yang sedang menjabat. Kelima, meningkatnya perilaku tidak memilih diakibatkan kecenderungan budaya politik yang ada dalam masyarakat (Kacung Marijan 2005:53). Hal ini yang terjadi di Kelurahan Manggala Kota Makassar, dimana partisipasi diruang-ruang demokrasi masyarakat mulai menurun akibat kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya memberikan hak suara dalam proses pilkada. Pada umumnya masyarakat yang ada di Kelurahan Manggala memiliki sikap apatis dalam menanggapi proses demokrasi yang ada.

Tingkat partisipasi pemilih di Kota Makassar pada pemilihan walikota tak berbeda jauh ketika warga Makassar menghadapi Pemilihan gubernur Sulawesi-Selatan (pilgub sul-sel, selanjutnya akan disebut demikian). Pada Tahun 2018, ketika pemilihan kepala daerah berlangsung di Kota Makassar dengan jumlah pemilih tetap sebanyak 1.228.962, naik 20% sebagaimana data dari KPU. Ternyata angka perilaku tidak memilih juga naiknya hampir sama. Dari 38,8% menjadi 55% lebih. Seperti yang kita ketahui bahwa yang terjadi di Kelurahan Manggala sendiri. Tempat penulis tinggal dan sebagai salah satu yang ada dengan jumlah pemilih sebanyak 90.809. Namun yang menggunakan hak suaranya hanya 59.763. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis mengambil judul dari penelitian ini adalah *“Fenomena Tidak Memilih pada Pemilihan Walikota Makassar di Kelurahan Manggala”*.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan & Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Sesuai dengan namanya, penelitian kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa atau kata-kata atau narasi (Imam Gunawan, 2015).

Menggunakan metode penelitian kualitatif tersebut, dapat digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan fenomena atau data yang ditemukan di lapangan secara detail seperti yang dimaksud dalam penelitian ini fenomena perilaku tidak memilih pada pemilihan Walikota Makassar. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu kombinasi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sesuai dengan bentuk pendekatan kualitatif dan sumber data yang digunakan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang fenomena perilaku tidak memilih pada pemilihan Walikota Makassar. Arikanto berpandangan bahwa untuk mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian diperlukan cara atau teknik pengumpulan data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar (Ida Bagoes Mantra, 2004). Penelitian ini bersifat deskriptif, sebab penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan tentang fenomena perilaku tidak memilih pada pemilihan Walikota Makassar di Kelurahan Manggala.

Pembahasan

Pandangan Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Walikota Makassar 2018

Pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar Tahun 2018 angka golput mencapai 41,02 persen dari keseluruhan daftar pemilih tetap atau dengan kata lain pasangan atau kandidat yang menang dikalahkan oleh Golput. Golput, adalah akronim dari golongan putih. Istilah ini ditujukan kepada mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu. Dengan demikian, orang-orang yang berhalangan hadir di Tempat Pemilihan Suara (TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau terluput dari pendaftaran, otomatis dikeluarkan dari kategori golput. Begitu pula persyaratan yang diperlukan untuk menjadi golput bukan lagi sekedar memiliki rasa enggan atau malas ke TPS tanpa maksud yang jelas.

Kota Makassar khususnya di Kelurahan Manggala yang menjadi sampel penelitian karena mempunyai tingkat golput relatif rendah diantara kelurahan- kelurahan lain pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar Tahun 2018, lebih banyak memiliki masyarakat yang sudah berada di kategori golput pragmatis, karena mereka apatis akan pemilu yang berjalan pada saat ini dengan asumsi yang terbangun suara yang dimiliki tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil pemilu. Hal ini dikemukakan pada hasil wawancara dengan Laely Nurfitriani (Informan) di Kelurahan Manggala pada tanggal 05 September 2020, yang mengatakan bahwa:

“Pada pemilihan walikota dan wakil walikota, saya pribadi mengatakan golput pada saat itu dikarenakan saya tidak terlalu percaya terhadap figur ketiga pasangan calon pada pilwali, selain itu suara yang terhitung satu yang saya miliki tidak terlalu berpengaruh juga terhadap hasil pilwali maka dari itu saya lebih memilih golput dan menjalankan kesibukan yang saya anggap lebih penting.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat memilih tidak menyalurkan suaranya dikarenakan mereka tidak terlalu percaya terhadap calon yang maju sebagai kandidat serta mereka beranggapan bahwa suara mereka kelak tidak akan berpengaruh terhadap hasil pemilu atau dapat dikatakan kepercayaan politik yang dimiliki masyarakat mengalami penurunan, atas alasan itu mereka lebih mementingkan pekerjaan pribadi dari pada datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan hak suara. Pernyataan diatas menjelaskan tentang pemilih golput dalam kategori pragmatis, sejalan apa yang diungkapkan Indra J. Pilliang bahwa golput pragmatis yaitu golput yang berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih. Sikap mereka setengah-setengah memandang proses pemilihan suara pada H, antara percaya dan tidak percaya. hal ini didukung pula oleh masyarakat yang tinggal di Kelurahan Manggala terdapat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai wiraswasta, yang lebih mementingkan pekerjaan mereka ketimbang hadir di tempat pemungutan suara saat hari pemungutan suara berlangsung. Sifat dari golput pragmatis yang tidak permanen yang memungkinkan pemilih untuk berpartisipasi atau tidak pada setiap pemilu yang diadakan. Berikut hasil wawancara dengan Yohanis Pakinja selaku masyarakat pada tanggal 11 September 2020, mengungkapkan bahwa:

“Pemilihan walikota ini kurang menarik perhatian saya sebab saya tidak pernah melihat proses kampanye di daerah tempat tinggal saya. Saya tidak begitu mengenal siapa saja para calon dan orang terdekat saya pun tidak pernah memberikan saya informasi terkait pemilihan walikota ini.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yohanis Pakinja (Informan) ditemukan pemilih yang pada pilkada lalu turut berpartisipasi dalam hal memilih namun pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar Tahun 2018 dia lebih memilih golput. Pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar Tahun 2018 kategori golput politis juga ditemukan di Kelurahan Manggala sebagaimana yang dimaksud golput politis merupakan golput yang dilakukan akibat pilihan-pilihan politik. kelompok ini masih percaya kepada Negara, juga percaya kepada pemilu, tetapi memilih golput akibat preferensi politiknya berubah atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan mereka. sehingga dapat dikatakan golput politis terjadi ketika pemilih merasa tidak menemukan yang bisa mewakili kepentingan dari sekian kandidat, namun golput politis tidak permanen.

Fenomena seperti ini seringkali ditemukan pada setiap pemilihan umum namun hal ini tidak permanen karena sifatnya yang sering berubah tergantung preferensi politik pemilih. seperti yang diungkapkan Eep Saefullah bahwa golput politis adalah untuk masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat (yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, mereka mengaku tidak ada satupun kandidat yang sesuai dengan harapannya dan karena itu tak mau mencoblos. Bagaimanapun, golput politis tak permanen. mereka berhenti menjadi golput manakala pilihan tersedia atau demokratisasi mencapai kemajuan berarti sehingga tak lagi hanya bertumpu pada lembaga formal. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Sitti Jumria salah satu informan pada tanggal 07 September 2020, yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak memilih karena saya sudah pesimis dengan hasil pemilu, selama ini yang saya lihat, pemilu seakan sia-sia tidak ada hasil yang signifikan, apalagi saya juga pesimis dengan kandidatnya, saya kurang yakin mereka jika terpilih dapat membawa perubahan sesuai janjinya waktu kampanye.”

Tipe golput politis sangat berhubungan dengan orientasi kandidat dan isu yang melihat bagaimana kepentingan masyarakat yang merasa terwakili oleh kandidat yang dipilihnya namun pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar Tahun 2018 di kota Makassar hal ini tidak terlihat oleh sebagian masyarakat yang cenderung golput karena merasa kandidat yang maju bukan representatif mereka dan dampak terburuknya masyarakat semakin apatis akan ajang pesta demokrasi. Seperti menurut Mufti Mubarak, “bagi masyarakat, sikap golput lebih dianggap sebagai bentuk perlawanan atas parpol dan para kandidat yang tidak sesuai dengan aspirasi. Sedangkan disisi kandidat, golput akan melemahkan legitimasi mereka kelak ketika berada di lembaga pemerintah”.

Masyarakat kota Makassar baru saja menggelar pesta demokrasi Pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar Tahun 2018 baru-baru ini. Dari hasil rekapitulasi suara oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Makassar, tingkat partisipasi pemilih di kota Makassar yaitu sebesar 58,98% atau 584.406

orang yang menggunakan suaranya dari 990.836 daftar pemilih tetap artinya ada sebesar 41,02% golput atau 406.430 orang yang tidak menggunakan suaranya dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar Tahun 2018. Namun dari hasil rekapitulasi itu, persentase partisipasi pemilih menunjukkan angka 58,98%. Dari 990.836 jiwa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya

584.406 orang atau 58,98 persen yang menggunakan hak pilihnya. Sisanya sebanyak 406.430 orang atau 41,02 persen memilih tidak menggunakan hak suaranya. Dengan kata lain pemenang

Pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar Tahun 2018 adalah golongan putih (Golput) (KPU Kota Makassar).

Persentase ini ternyata tidak jauh beda dengan partisipasi pemilih dalam Pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar Tahun 2013 silam, dari jumlah DPT yang sebesar 988.208 Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka yang menggunakan hak pilihnya sebesar 592.299 orang dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 305.909 orang atau sebesar 40,06% (KPU Kota Makassar).

Keberadaan golongan putih (Golput) di kota Makassar khususnya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar Tahun 2018 sangat memprihatinkan. Pemilihan walikota yang notabene menentukan nasib daerah, masih dipandang kurang menarik perhatian masyarakat. Sebagian masyarakat lebih memilih melakukan pekerjaan lain yang lebih menguntungkan atau menikmati masa libur lokal yang diberlakukan untuk pelaksanaan pilkada ketimbang untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan menggunakan hak pilihnya.

Angka golput jauh cenderung lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan daerah pedesaan. Padahal masyarakat perkotaan memiliki akses politik yang lebih besar dari pada pedesaan. Fenomena ini dikarenakan masyarakat perkotaan lebih realistis dari pada masyarakat pedesaan. Masyarakat perkotaan memandang pesta demokrasi ini hanya sekedar pertarungan antara beberapa kepentingan.

Pemilih golput beranggapan bahwa pertarungan ini bukanlah kepentingan untuk memajukan daerah, tetapi kepentingan oleh golongan tertentu. Jadi, siapapun yang menjadi pemenang proses demokrasi ini, bukanlah menjadi kemenangan rakyat seutuhnya. Melainkan kemenangan golongan tertentu. Selain itu, tingkat kesibukan masyarakat perkotaan yang sangat padat. Menjadi Alasan mengapa masyarakat bersikap apatis atau tidak peduli terhadap momentum ini.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Tidak Memilih ***Faktor Psikologis***

Kedekatan masyarakat dengan salah satu calon walikota dan wakil walikota dapat menjadi salah satu faktor mengapa masyarakat ikut memilih maupun tidak ikut memilih, pada temuan hasil wawancara di lapangan mayoritas masyarakat yang menjadi informan tidak mempunyai hubungan dengan semua calon walikota dan wakil walikota. Hal ini berarti bahwa kedekatan masyarakat dengan salah satu calon walikota dan wakil walikota benar-benar mempengaruhi masyarakat untuk ikut atau tidak ikut dalam pemilihan. Kampanye adalah usaha yang dilakukan oleh para kandidat untuk meyakinkan para calon pemilih untuk mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan program-programnya. Melalui kampanye, para kandidat menawarkan program-programnya dengan harapan calon pemilih merasa yakin dan memberikan mandatnya. Bagi publik atau calon pemilih, kampanye merupakan sarana untuk melihat, mengamati, menentukan calon mana yang akan dipilihnya. Demikian juga kampanye bukan hanya sekedar kebutuhan para calon walikota dan wakil walikota tetapi juga kebutuhan pemilih untuk menentukan pilihannya bahkan menentukan akan menggunakan hak pilihnya atau tidak.

Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kampanye tidak begitu besar, hasil temuan di lapangan bervariasi sebagian menunjukkan sebagian informan yang pernah mengikuti dan terlibat dalam kampanye dan sebagian dari informan tidak pernah mengikuti ataupun terlibat dalam kampanye. Hal ini berarti keikutsertaan seseorang dalam berkampanye tidak menjadi penentu bahwa orang tersebut akan ikut dalam pemilihan, kebanyakan masyarakat yang ikut dan terlibat kampanye hanya sebagai massa yang menikmati suguhan hiburan yang disediakan/diberikan parpol atau calon yang sedang berkampanye.

Setiap calon kepala walikota dan wakil walikota akan selalu berusaha mendekatkan diri kepada masyarakat untuk mengambil simpati dari masyarakat dengan harapan masyarakat tersebut akan memilihnya pada saat pemilihan berlangsung. Setiap calon akan berusaha mendekatkan dirinya kepada masyarakat melalui kampanye-kampanye secara langsung ke lapangan, kampanye melalui media massa, televisi, radio maupun melalui spanduk-spanduk. Mereka juga tidak jarang memberikan sumbangan-sumbangan pada korban bencana yang ada di daerahnya pada saat pemilihan sudah dekat, hal ini dilakukan untuk menarik simpati dari masyarakat dengan harapan masyarakat akan memilihnya pada saat pemilihan sudah tiba.

Pada hasil temuan di lapangan menunjukkan mayoritas informan masyarakat menilai para calon walikota dan wakil walikota sudah melakukan pendekatan yang baik dengan masyarakat namun masyarakat atau informan sudah paham bahwa itu adalah salah satu strategi mereka untuk mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dengan mendapat hati masyarakat melalui pendekatan tersebut. Bagi sebagian masyarakat pasti akan kagum dengan cara memilih calon tersebut tapi bagi sebagian lagi hal itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap pilihannya kelak. Seperti yang dikatakan oleh Wahida salah satu informan pada tanggal 16 September 2020, yang mengatakan bahwa:

“Saya merasa bahwa para tim pemenangan yang mendatangi saya tidak membuat saya yakin terhadap apa yang mereka sampaikan, kadangkala malah membuat saya merasa jengkel dengan apa yang mereka sampaikan karena setiap saya bertemu dengan mereka hal yang sama yang saya dengar berulang-ulang, dilain sisi saya tidak pernah melihat para kandidat turun langsung berkampanye di daerah saya.”

Jadi dapat dikatakan bahwa faktor kedekatan calon walikota dan wakil walikota cukup mempengaruhi masyarakat untuk menentukan tidak ikutnya dalam pemilihan. Pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2018 di kelurahan Manggala masyarakat juga cenderung memilih golput dengan alasan faktor psikologis dimana kedekatan yang kurang mereka rasakan terhadap kandidat hal ini disebabkan lemahnya sosialisasi politik yang dilakukan kandidat. bentuk sosialisasi yang dilakukan kandidat tidak sampai menyentuh ke lapisan bawah dan cenderung hanya berfokus di suatu tempat kemudian sikap apatis terhadap aktivitas politik seperti kampanye menyebabkan prasangka tentang aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia. Kemudian jika dilihat dari kepribadian masyarakat golput yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi dan semacamnya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih. Hal tersebut dikemukakan oleh Asmira salah satu informan pada tanggal 14 September 2020 yang mengatakan bahwa:

“Tegas saya mengatakan bahwa bukan faktor eksternal yang menjadikan saya golput namun kedirian saya pribadi menolak dan tak ingin ikut campur dalam aktivitas politik yang selama ini syarat akan kepentingan satu golongan selain itu saya tidak mengenal secara dekat semua kandidat hal dikarenakan jarang sekali ada kegiatan turun langsung bersosialisasi yang dilakukan kandidat terkhusus di Manggala, jadi dapat saya simpulkan alasan saya golput memang saya menghindari aktivitas politik yang merupakan kegiatan musiman dan tidak terlalu penting buat saya.”

Faktor psikologis yang menyebabkan golput pada sebagian masyarakat di kelurahan Manggala sejalan dengan yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Arnold K. Sherman dan Aliza

Kolker, melihat bahwa perilaku *non-voting* disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomali, dan alienasi (Arnold K. Sherman dan Aliza Kolker 1987:134). Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan penjelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan politik atau adanya perasaan bahwa aktivitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung. Anomi menunjukkan pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka merasa mungkin tidak mampu mempengaruhi peristiwa dan kebijaksanaan politik. bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih, tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik sering kali berada diluar kontrol pemilih.

Sebab para pemilih biasanya menggunakan logika-logikanya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak hal mereka berada jauh diluar jangkauan pemilih. Perasaan inilah yang disebut dengan anomie. Sedangkan alienasi berada diluar apatis dan anomie. Alienasi merupakan perasaan keterasingan secara aktif. Seseorang merasa dirinya tidak terlibat dalam banyak urusan politik. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh-pengaruh terhadap kehidupan seseorang.

Faktor Sistem Politik

Salah satu faktor yang menjadi alasan masyarakat enggan untuk memberikan memenuhi haknya sebagai warga Negara adalah sistem politik. Banyaknya aturan tentang proses pemilihan dan kurangnya sosialisasi yang didapatkan oleh masyarakat sehingga mereka lebih memilih untuk tidak memberikan hak suaranya. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Astuti Arsyad salah satu informan pada tanggal 16 September 2020, yang mengatakan bahwa:

“Bagi saya, tidak ada alasan yang pasti untuk menarik minat saya dalam proses pemilu, karena sistem dari pemilihan cukup memusingkan. Lain lagi saya harus menunggu lama di TPS, sehingga saya merasa jenuh kondisi pemilihan umum.”

Hal ini sejalan oleh hasil wawancara dengan Marna salah satu informan pada tanggal 07 September 2020, yang mengatakan bahwa:

“Yang paling membuat saya memilih tidak ke TPS karena saya tidak mengerti sama sekali tentang sistem pencoblosan yang berlangsung.”

Faktor sistem politik menjadi salah satu faktor yang mendasari masyarakat tidak mengikuti pemilihan umum di Kelurahan Manggala. Hal ini tidak sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Almond menyatakan sistem politik adalah hubungan timbal balik/interaksi dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi (Almond A. Gabriel. 1984:77). Berbeda dengan keterangan oleh Sitti Hasmiah salah satu informan pada tanggal 19 September 2020, yang mengatakan bahwa:

“Saya sebenarnya sangat suka salah satu sosok dari calon walikota dan wakil walikota Makassar, tapi saya memilih tidak memberikan suara saya karena saya tidak mempercayai partai-partai pengusung yang menjadi syarat untuk maju sebagai kandidat.”

Dari penjelasan yang didapatkan dari informan dapat kita simpulkan bahwa peranan partai politik sangat mempengaruhi persepsi masyarakat. Kurangnya aktivitas partai politik setelah pilkada serta program dari partai juga jarang dirasakan masyarakat. Hal ini menjadikan alasan bahwa partai hanyalah tunggangan kandidat untuk dapat ikut berkontestasi dalam pemilihan umum walikota

Makassar, sehingga masyarakat tidak mempercayai partai-partai pengusung. Hal ini juga dipengaruhi oleh penyelenggara pemilihan umum yang memiliki penataan sistem yang belum cukup baik. Sehingga membuat para pemilih menjadi enggan untuk menyalurkan suaranya. Lain lagi sistem pendataan dari penyelenggara yang tidak lengkap. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Tenri Sasmita salah satu informan pada tanggal 19 September 2020, yang mengatakan bahwa:

“Sistem pendataan yang ada di KPU semakin tidak jelas, masa pada pemilihan yang lalu saya mendapat surat undangan, tapi pada pemilihan walikota kemarin saya tidak mendapat surat undangan dari KPU.”

Faktor Kepercayaan Politik

Faktor kepercayaan politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih. Seperti ketidakpercayaan pemilih terhadap partai, tidak memiliki pilihan dari kandidat yang tersedia atau tidak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan bagi kondisi masyarakat. Seperti yang dikemukakan Rahimi salah satu informan pada tanggal 09 September 2020, yang mengatakan bahwa:

“Saya lebih baik tidak memilih, karena setahu saya bahwa politik hanyalah jembatan bagi para oknum untuk mendapatkan keuntungan finansial.”

Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Image bahwa politik itu kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain sebagainya akan lebih memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik sehingga masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilihnya. Stigma ini terbentuk karena tabiat sebagian politisi yang masuk pada kategori politik instan atau pemimpin “karbitan”. Politik dimana seorang pemimpin baru akan mendekati masyarakat ketika ada agenda politik seperti pemilu. Faktor lain adalah banyaknya politisi yang jiwa kepemimpinannya tidak mengakar kuat dalam masyarakat, politisi yang jauh dari hati rakyat serta tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagian politisi lebih dekat dengan para petinggi partai, dengan pemegang kekuasaan. Mereka lebih menggantung diri pada pemimpinnya dibandingkan mendekati diri dengan konstituen atau pemilihnya. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbedapartai. Konflik seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik.

Politik pragmatisme yang semakin menguat, baik kalangan politisi maupun disebagian masyarakat. Para politisi hanya mencari keuntungan sesaat dengan cara mendapatkan suara rakyat. Sedangkan sebagian masyarakat kita saat ini hanya akan memenuhi hak politiknya jika ada transaksi-transaksi materi yang menguntungkan dirinya. Misalnya pemilih mau mendukung salah satu kandidat atau partai politik jika dia mendapatkan keuntungan materi. Kondisi-kondisi inilah yang secara politik mempengaruhi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Sebagian Masyarakat semakin tidak yakin dengan politisi. Harus diakui tidak semua politisi seperti ini, masih banyak politisi yang baik, namun mereka yang baik tenggelam dikalahkan politisi yang tidak baik.

Faktor Sosial Ekonomi

Faktor-faktor sosial ekonomi meliputi keadaan sosial dan keadaan ekonomi. Tingginya tingkat kehadiran pemilih dari pemilih yang berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Hasil temuan Verba dan Nie menyimpulkan “*the best known about turnout is that citizens of higher social and*

economic status participate more in politics.” (yang utama tentang kehadiran bahwa warga negara yang status sosial dan ekonomi lebih berpartisipasi politik...) (Verba, S., & Nie, N.H. 1978:200). Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia baik pendidikan formal maupun informal. Dari data yang didapat dapat dilihat bahwa secara umum Informan yang diambil adalah masyarakat di Kelurahan Manggala yang sudah berpendidikan cukup tinggi.

Berdasarkan dari uraian diatas dapat digambarkan bahwa faktor pendidikan juga mempengaruhi masyarakat di Kelurahan Manggala untuk ikut atau tidak ikut dalam pemilihan. Sebab, masyarakat di Kelurahan Manggala yang tingkat pendidikannya cukup tinggi tidak ikut memilih (golput) dalam pemilihan bukan karena ketidakpedulian mereka terhadap pemilu atau terhadap masalah politik tetapi, tingkat pendidikan yang cukup tinggi membuat mereka semakin kritis dan rasional terhadap masalah politik serta mempunyai penolakan yang cukup tinggi terhadap calon atau kandidat yang menurut mereka tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik untuk memimpin daerah kelak, hal ini baru diketahui peneliti setelah menganalisis hasil wawancara terhadap beberapa informan di lapangan. Sebaliknya semakin rendah tingkat pendidikan seseorang semakin kecil pula tingkat kepeduliannya terhadap masalah politik.

Berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan di lapangan ditemukan golput disebabkan oleh faktor sosial yaitu tingkat pendidikan pemilih, salah satu dari sekian informan yang berlatar belakang pendidikan tinggi yang golput pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018 hasil wawancara dengan Nur Aisyah salah satu informan pada tanggal 05 September 2020, yang mengatakan bahwa:

“Jujur saya katakan pada pilwali yang lalu saya lebih memilih golput hal ini dikarenakan setelah saya analisa dari sekian pemilu di kota Makassar hanya menimbulkan rasa kecewa pada diri pribadi saya dimana ketika pada saat kampanye kandidat cenderung terlalu mengumbar janji namun setelah terpilih tidak dibuktikan, secara sosiologis menyerang keyakinan pada diri pemilih dan hal itu terus berulang sehingga menciptakan stigma negatif terhadap aktor-aktor yang main di panggung politik.”

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa tingkat pendidikan yang tinggi juga menyebabkan seseorang golput namun di Kelurahan Manggala hal tersebut hanya ditemukan pada beberapa informan dan yang mayoritas golput disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, kondisi masyarakat di Kelurahan Manggala juga masih terdapat pemukiman-pemukiman yang masyarakatnya berstatus ekonomi rendah sehingga banyak ditemukan golput yang terjadi pada masyarakat yang kurang berpendidikan contohnya seperti hasil wawancara dengan Mursalim S salah satu informan pada tanggal 11 September 2020, yang mengatakan bahwa:

“Sejujurnya, alasan saya tidak memilih yaitu saya merasa kalau efek dari suara yang saya berikan andaikata saya memilih pergi tidak bakalan berpengaruh besar terhadap setiap hasil keputusan yang akan terjadi. Jadi daripada saya capek-capek pergi antri untuk mencoblos di TPS mending saya pergi narik bentor, saya pikir dengan itu lebih memungkinkan untuk saya dapat penghasilan dibanding capek-capek pergi mencoblos baru tidak ada di dapat apa-apa lagi selama ini jarang saya lihat walikota turun langsung.”

Faktor sosial ekonomi merupakan faktor krusial sehingga masyarakat mayoritas golput, tingkat pendidikan dan ekonomi rendah masyarakat terkadang menimbulkan dilematis bagi diri pemilih namun sekali lagi urusan finansial mampu mengaburkan keinginan masyarakat untuk ikut

berpartisipasi pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018 di Kelurahan Manggala karena asumsi yang terbangun pada diri masyarakat adalah lebih mementingkan apa yang nampak dan menghasilkan sesuatu yang pasti dan menguntungkan daripada menggantungkan harapan yang tidak pasti.

Fenomena tersebut senada dengan yang dikemukakan sebelumnya oleh Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rossenstone bahwa “tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping memungkinkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan, disekolah dan perkuliahan, kita belajar mengenai sistem politik dan bagaimana suatu isu mempengaruhi hidup kita dan diterangkan untuk menekan teman sebayanya untuk berpartisipasi dalam proses politik dan suatu perolehan dari rasa keberhasilan dari mengambil alih takdir kita” (Raymond E. Wolfinger & Steven J. Rossenstone 1997:30). Segala pengaruh ini mempengaruhi kita untuk memberikan suara, yang kurang berpendidikan dengan perbedaan terpengaruh untuk menghindari politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam suatu proses politik, ketidakpedulian atas hubungannya terhadap kehidupan mereka dan kekurangan kemampuan mereka perlu dihadapkan pada aspek-aspek birokratik dari memilih dan mendaftar. Sementara itu pekerjaan pekerjaan tertentu lebih menghargai lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadiran dalam pemilu disbanding para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Masyarakat sudah lelah dengan janji- janji kampanye yang tidak pernah ditepati. Pemilu kini mulai dipertanyakan oleh masyarakat, tidak ada keuntungan signifikan yang diperoleh masyarakat dalam keikutsertaan mereka dalam pemilihan. Dengan persepsi inilah yang menjadikan masyarakat lebih mementingkan urusan lain seperti yang lebih menguntungkan dari pada menghadiri acara pemilihan. Dari data yang didapat diketahui bahwa seluruh informan tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Manggala kurang berpartisipasi dalam Pilkada tahun 2018 yang lalu. Mayoritas informan beralasan tidak menggunakan hak pilih pada pilgub karena asumsi yang terbangun pada diri masyarakat yaitu lebih mementingkan kepentingan ekonomi serta mereka menganggap bahwa pemilu tidak akan membawa perubahan yang signifikan asumsi tersebut terbangun karena didukung oleh faktor tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah.

Kesimpulan

Pandangan Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Walikota Makassar 2018, Keberadaan golongan putih (Golput) di kota Makassar khususnya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018 sangat memprihatinkan. Di lokasi penelitian di Kelurahan Manggala ditemukan dua kategori golput berdasarkan alasan dan sebab mereka tidak menggunakan hak suaranya, yang pertama yaitu kategori masyarakat golput pragmatis. Masyarakat berpandangan apatis akan sistem pemilu yang berjalan pada saat ini dengan asumsi yang terbangun suara yang dimiliki tidak terlalu berpengaruh terhadap hasil pemilu, Sedangkan kedua yaitu sebagian masyarakat golput politis, masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, mereka mengaku tidak ada satupun kandidat yang sesuai dengan harapannya dan karena itu tak mau mencoblos.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak ikut dalam pemilihan walikota Makassar 2018. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi

persepsi masyarakat sehingga menimbulkan suatu fenomena tidak memilih yaitu meliputi, yang pertama, faktor psikologis dimana kedekatan yang kurang mereka rasakan terhadap kandidat hal ini disebabkan lemahnya sosialisasi politik yang dilakukan kandidat. Bentuk sosialisasi yang dilakukan kandidat tidak sampai menyentuh ke lapisan bawah dan cenderung hanya berfokus di suatu tempat kemudian sikap apatis terhadap aktivitas politik seperti kampanye menyebabkan prasangka tentang aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia. Yang kedua, faktor sistem politik selalu dinamis namun pada penerapannya malah menjadi masalah karena tidak banyak masyarakat yang memahami pola perputaran regulasi politik. Yang ketiga, faktor kepercayaan politik tidak banyak dari masyarakat yang menaruh harapan dan gagasannya kepada calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah. Sehingga hal tersebut menjadi pemicu kurangnya kepercayaan politik masyarakat. Yang keempat, faktor sosial ekonomi merupakan faktor krusial sehingga masyarakat mayoritas golput, tingkat pendidikan dan ekonomi rendah masyarakat terkadang menimbulkan dilematis bagi diri pemilih namun sekali lagi urusan financial mampu mengaburkan keinginan masyarakat untuk ikut berpartisipasi pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 di Kelurahan Manggala karena asumsi yang terbangun pada diri masyarakat adalah lebih mementingkan apa yang nampak dan menghasilkan sesuatu yang pasti dan menguntungkan dari pada menggantungkan harapan yang tidak pasti.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, A. Gabriel. 1984. *Budaya Politik (Tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara)*. Jakarta. Bina Aksara.
- Arikunto. Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta. PT. Rineka Cipta.
- Asfar, Muhammad. 2002. *Model Pemilihan di Indonesia*. Surabaya. Pusdeham. Asfar, Muhammad. 2004. *Presiden Golput*, Jakarta: Jawa Pos Press.
- Azra, Azyumardi. 2000. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta. ICCE UIN Jakarta.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka. Efriza. 2012. *Political Explore*. Bandung. CV Alfabeta.
- Firmanzah, 2012, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Greenstein, L. (2012). *Assessing 21st Century Skills: A Guide to Evaluating Mastery and Authentic Learning*. California. Corwin, A Sage Company.
- Harahap, Abdul. 2005. *Manajemen Dan Resolusi Konflik*. Jakarta. Pustaka Cidesindo.
- Heywood, Andrew. 2014. *Politik*. Jakarta. Pustaka Pelajar.

Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2018.

Kristiadi, J. 1996. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia*. Jakarta. LP3ES.

Mahendra, A.A. Oka 2005. *Pilkada di Tengah Konflik Horizontal: Nurmahmudi Ismail Unggul di KPUD, Badul Kamal Menang di Pengadilan Tinggi*. Jakarta. Millenium Publisher.

Marijan, Kacung. 2005. *Demokratisasi di Daerah*. Surabaya. Airlangga University Press.

Nelson, Joan & Huntington, P. Samuel 2012. *“Partisipasi Politik di Negara Berkembang”*. Jakarta. Rineka Cipta.

Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Prihatmoko, J. Joko 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus Politik dan Konflik Politik: Sebuah Penajagan Teoritis*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Sanit, Arbit. 2011. *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta. Penerbit CV Rajawali.

Sherman, Arnold K. & Aliza Kolker. (1987). *The Social Bases of Politics*. California: A Division of Wodsworth Inc.

Soche, Harris. 1985. *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta. Hanindita Offset.

Soekanto, Soerjono, *Kamus Sosiologi*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Sudijono, Anas.1995. *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta. Rajawali Pers. Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. CV Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.

Sy, Pahmi. 2010. *Politik Pencitraan*. Jakarta. Gaung Persada Press.

Tiro, Arif. Muhammad. 2011. *Statistika Terapan*. Makassar. Andira Publisher.

UU RI Nomor 32 Tahun 2004 pasal (25), tentang “tugas dan wewenang serta kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Verba, S., & Nie, N.H. 1978. *Participation and Political Equality: A Seven- Nation Comparison*. Chicago: Chicago University Press.

Wolfinger, E. Raymond & Rosenstone, J. Seven. 1997. Who Votes?, dalam George C. Edwards. *Government In America, People, Politics, and Policy*. United States: Addison-Wesley Educational Publisher Inc.